



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRIYADI
2. Jabatan : CAMAT
3. NHK : 504238

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.310.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 20000 m2/120 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, WARISAN Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 258 m2/153 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Tanah Seluas 7400 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
7. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 119.500.000

1. MOTOR, HONDA HONDA NC11B1C R2 Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA G Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 126.400.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.476.613



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 2.558.376.613 |
| III. HUTANG | Rp. | 45.077.705 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.513.298.908 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.